

BAB V

KESIMPULAN

Kebijakan *war on drug* merupakan sebuah upaya yang dicanangkan oleh Duterte untuk mengatasi masalah narkoba yang telah berkembang pesat di Filipina. Kebijakan tersebut bertujuan untuk berperang melawan narkoba, baik secara penggunaan, peredaran, maupun penjualannya.

Berdasarkan analisis isi dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen produk regulasi tersebut cenderung mengarah pada pendekatan realisme. Hal tersebut disebabkan karena lebih tingginya penggunaan frasa dan kata dari pendekatan realisme pada kelima indikator yang telah ditentukan. Indikator aktor mendapatkan persentase sebesar 56.8%, indikator otoritas sebesar 51.9%, indikator sumber anggaran sebesar 60%, indikator tata kelola sebesar 83.3%, dan indikator output sebesar 95.8%, dengan total persentase kumulatif pada pendekatan realisme sebesar 69.7%.

Sedangkan persentase pendekatan liberalisme pada indikator aktor hanya mendapatkan sebesar 43.2%, indikator otoritas sebesar 48.1%, indikator sumber anggaran 40%, indikator tata kelola 16.2%, dan indikator output sebesar 4.2%, dengan total persentase kumulatif pada pendekatan tersebut sebesar 30.3%.

Dari hasil kuantifikasi tersebut menunjukkan bahwa dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina memberikan gambaran bahwa Filipina dalam mengatasi masalah narkoba cenderung menggunakan kebijakan yang menekan paksa baik itu dari perkembangan dan peredaran narkoba. Hal ini didukung oleh penyusunan dokumen yang cukup sistematis sesuai dengan urutan masalah yang dianggap memiliki urgensi lebih tinggi untuk ditangani. Selain itu pemilihan diksi atau kata juga menjadi hal yang penting dalam

penyusunan dokumen produk regulasi tentang narkoba. Walaupun penulisan dokumen produk regulasi tersebut sudah dapat dikatakan sistematis, namun disisi lain terdapat adanya kekurangan karena ada beberapa elemen yang kurang menunjukkan korelasi yang sesuai dari satu faktor terhadap faktor lain. Namun secara keseluruhan penyusunan produk regulasi tentang narkoba di Filipina sudah dianggap cukup untuk memberikan tuntunan dalam mengatasi masalah narkoba yang terjadi di Filipina.

Karakteristik utama yang diciptakan pada produk regulasi tentang narkoba di Filipina adalah penekanannya pada hukuman sebagai kebijakan kontrol. Oleh karena itu Presiden Duterte dalam menerapkan kebijakan berperang terhadap narkoba terbukti bahwa ia tidak melakukan *abuse of power*. Karena tindakan-tindakan yang dicanangkan oleh Duterte dalam mengatasi masalah narkoba yang terjadi di Filipina telah tertera dalam dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, baik hal itu termasuk melakukan hukuman mati, penjara seumur hidup, denda, pemecatan dari jabatan pemerintahan, serta penjara dengan batas waktu tertentu. Walaupun banyak kasus-kasus pembunuhan yang terjadi terhadap para pengguna maupun penjual narkoba di Filipina, rupanya sulit untuk mengatakan bahwa Duterte dalam melaksanakan kebijakannya melakukan *extrajudicial killings*. Karena kasus-kasus pembunuhan tersebut memang dibawah oleh operasi-operasi yang telah direncanakan dalam upaya memberantas perkembangan dan peredaran narkoba di Filipina.

Walaupun produk regulasi tentang narkoba di Filipina lebih dominan memiliki pendekatan realisme, namun sebenarnya produk regulasi tersebut memiliki dua arah kebijakan (*policy intentions*) dalam memandang masalah narkoba yang terjadi di Filipina. Pada satu sisi, produk regulasi ini memiliki pendekatan realisme, yaitu dengan melakukan kampanye intensif dan berkelanjutan terhadap pengguna dan penyelundup narkoba, dimana pada pendekatan ini pemerintah harus melawan narkoba meskipun harus menggunakan cara

kekerasan. Pada pendekatan ini para pengguna dan penjual narkoba dianggap sebagai model kriminal. Model kriminal memiliki perspektif pendekatan realisme, karena pada model kriminal ini dicirikan sebagai konsekuensi pilihan dari masing-masing individu. Setiap individu memiliki pilihannya masing-masing untuk menjadi orang yang bebas dari narkoba, pecandu narkoba, atau bahkan sebagai penjual narkoba. Maka dari itu tiap individu harus bertanggung jawab atas keputusan mereka.

Selain itu tindakan yang tepat berdasarkan pendekatan realisme adalah sikap proaktif didasarkan pada perspektif komunitarian dengan pendekatan realisme, sikap ini memandang bahwa kebaikan bersama lebih penting daripada individu. Pada sikap ini kebijakan digunakan untuk melindungi kelompok dan negara, bahkan akan melakukan intervensi dengan cara menggunakan kekerasan jika individu telah mengancam keamanan dari kelompok dan negara.

Sedangkan pada sisi lainnya, produk regulasi ini memiliki pendekatan liberalisme, yaitu dengan mengulang kembali integrasi sosial. Pada pendekatan ini para pengguna narkoba dipandang korban, sehingga pemerintah harus menyediakan program perawatan dan rehabilitasi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah maraknya narkoba yang terjadi di Filipina. Pada pendekatan ini pengguna dan penjual narkoba dianggap sebagai model medis yang memiliki perspektif pendekatan liberalisme, karena pada model medis ini melihat para pengguna narkoba sebagai penyakit. Pada model medis ini memiliki pandangan cukup bertolak belakang dengan model kriminal, pada model ini para pengguna dilihat sebagai pasien atau korban yang harus diperlakukan dengan baik dan tidak dihukum.

Selain itu tindakan yang tepat berdasarkan pendekatan liberalisme adalah sikap reaktif didasarkan pada perspektif individualisme dengan pendekatan liberalisme, pada sikap ini memandang bahwa para pengguna narkoba pada mulanya merupakan sesuatu yang baik secara alami namun menjadi

rusak karena dunia sosial. Di sini kebijakan digunakan untuk melindungi individu dari kelompok-kelompok yang dapat merusak serta negara dilarang melanggar hak-hak dari para pengguna tersebut.